



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA PENGUNDURAN DIRI SAUDARA  
NUR HIDAYAD, S.E. DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA DRS. HASIM

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Surat Panewu Sewon Nomor 141/082 tertanggal 23 Februari 2021 perihal Permohonan Usulan PAW Anggota Bamuskal Periode 2018-2024;
  2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pengunduran Diri Saudara Nur Hidayad, S.E. dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari Periode 2018-2024;
  3. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pengusulan Saudara Drs. Hasim Sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari Periode 2018-2024;

- Menimbang :
- a. bahwa peresmian pemberhentian Saudara Nur Hidayad, S.E. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Saudara Drs. Hasim sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Karena Pengunduran Diri Saudara Nur Hidayad, S.E. dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Saudara Drs. Hasim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KARENA PENGUNDURAN DIRI SAUDARA NUR HIDAYAD, S.E. DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SAUDARA DRS. HASIM.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Nur Hidayad, S.E. dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Drs. Hasim sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Maret 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
5. Panewu Pajangan;
6. Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum

